

ANALISIS LITERATUR TENTANG PENGANGGARAN BERBASIS NILAI ISLAM DALAM KONTEKS KETAHANAN EKONOMI GLOBAL

¹Mutia Sekar Mayang Diyanti, ²Azizah Hanim Tsurayya, ³Najla Khayira, ⁴Suhendi

^{1,2,3,4}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: suhendi@uinsgd.ac.id

Abstract

This research discusses budgeting based on Islamic values in order to strengthen global economic resilience through a literature review divided into three main focuses. First, it discusses the principles of budgeting according to Islamic values that emphasise justice, balance, and the teachings of amar makruf nahi munkar, as well as the optimal utilisation of resources such as zakat, infaq, and sadaqah for the welfare of society as a whole. These values are different from conventional budgeting systems as they are orientated towards social welfare and the avoidance of hardship. Second, it outlines the contribution of Islamic budgeting in strengthening global economic resilience through support for micro, small and medium enterprises (MSMEs), financial inclusion, and economic recovery with Islamic financial instruments such as zakat and waqf, which help maintain economic stability and sustainability amid global challenges. Third, it examines the implementation and obstacles of Islamic value-based budgeting in various countries, including challenges in integrating Islamic fiscal policies in modern financial systems, transparency, and the application of Islamic values in the management of public finances and human resources. The results show that budgeting based on Islamic values can be a strategic solution to strengthen global economic resilience by emphasising social justice, equitable distribution of wealth, and the social responsibility of the state.

Keywords: *Islamic budgeting, global economic resilience, Islamic finance, equity principles, financial inclusion.*

Abstrak

Penelitian ini membahas penganggaran yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi global melalui tinjauan literatur yang dibagi ke dalam tiga fokus utama. Pertama, membahas prinsip-prinsip

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism Checker: 6 No
235

Prefix DOI :

[10.8734/Argopuro.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/Argopuro.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : Argopuro



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

penganggaran menurut nilai Islam yang menitikberatkan pada keadilan, keseimbangan, serta ajaran amar makruf nahi munkar, sekaligus pemanfaatan optimal sumber daya seperti zakat, infaq, dan sadaqah demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Nilai-nilai ini berbeda dengan sistem penganggaran konvensional karena berorientasi pada kesejahteraan sosial dan penghindaran kesulitan. Kedua, menguraikan kontribusi penganggaran syariah dalam memperkuat ketahanan ekonomi global melalui dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), inklusi keuangan, serta pemulihan ekonomi dengan instrumen keuangan Islam seperti zakat dan wakaf, yang membantu menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi di tengah tantangan global. Ketiga, menelaah penerapan dan hambatan penganggaran berbasis nilai Islam di berbagai negara, termasuk tantangan dalam mengintegrasikan kebijakan fiskal Islam dalam sistem keuangan modern, transparansi, serta penerapan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan keuangan publik dan sumber daya manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa penganggaran berdasarkan nilai Islam dapat menjadi solusi strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi global dengan menekankan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang adil, dan tanggung jawab sosial negara.

Kata Kunci: Penganggaran Syariah, Ketahanan Ekonomi Global, Keuangan Islam, Prinsip Keadilan, Inklusi Keuangan.

PENDAHULUAN

Ketahanan ekonomi global merupakan isu yang semakin krusial di tengah meningkatnya ketidakpastian dan tantangan struktural yang dihadapi berbagai negara. Krisis keuangan, ketimpangan distribusi kekayaan, serta gejolak geopolitik dan pandemi telah menunjukkan bahwa sistem ekonomi konvensional sering kali belum mampu menjamin stabilitas dan keadilan sosial secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, perlu adanya alternatif sistem ekonomi dan inovasi dalam kebijakan fiskal yang baik (Rahman, 2016), khususnya dalam sistem penganggaran negara, untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi yang inklusif dan resilien. Salah satu pendekatan yang mulai mendapat perhatian dalam diskursus akademik dan kebijakan publik adalah ekonomi Islam, terkhususnya dalam penganggaran berbasis nilai Islam (Islamic value-based budgeting), yang mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, kesejahteraan sosial, dan etika dalam seluruh proses perencanaan dan pengelolaan anggaran (Fitriani, dkk, 2024). Keberlanjutan sistem

ekonomi Islam telah menjadi topik penting dalam konteks global, terutama dalam menghadapi krisis keuangan (Ustaoglu & Yildiz, dalam Al-Qahtani & Darussalam, 2025).

Penganggaran berbasis nilai Islam tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, tetapi juga mendorong optimalisasi instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Keberadaan sistem penganggaran ini berpotensi untuk menghadirkan berbagai manfaat, seperti stabilitas keuangan dan deklinasi ketimpangan ekonomi (Fitriani, dkk, 2024). Selain itu, sistem penganggaran ini menjadi solusi yang berpeluang dalam menciptakan sistem anggaran yang berkelanjutan. Beberapa negara berpenduduk mayoritas Muslim, telah mulai mengeksplorasi integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem penganggaran dan kebijakan fiskal mereka. Pertumbuhan juga mulai terjadi di beberapa kawasan non-Muslim, seperti Eropa dan Amerika Utara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam, termasuk sistem penganggaran, dapat diakui sebagai bagian dari sistem keuangan modern dan dapat diadopsi secara global (Robinson, dalam Judijanto dan Rizani, 2024).

Namun demikian, implementasi penganggaran syariah tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan pemahaman pembuat kebijakan dan masyarakat terhadap prinsip maqashid al-shariah, kurang harmonisnya regulasi fiskal terhadap nilai-nilai Islam dan terhadap antar negara, serta kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola anggaran berbasis syariah (Feyz Arefi & Hafezian, dalam Judijanto & Rizani, 2024). Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk melakukan kajian literatur yang komprehensif guna memahami prinsip-prinsip, peran, serta implementasi dan penganggaran berbasis nilai Islam dalam menghadapi ketahanan ekonomi global.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis literatur terkait penganggaran berbasis nilai Islam, dengan fokus pada prinsip-prinsip dasar, peran, serta implementasi dan tantangan terhadap ketahanan ekonomi global. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis sekaligus praktis dalam merumuskan sistem penganggaran negara yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai etika Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah studi pustaka (library research). Studi

pustaka merupakan penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku, e-book, artikel dan jurnal ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah dan menganalisa objek kajian. Hasil dari penelitian studi pustaka ini berupa data-data yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip- Prinsip Penganggaran Berbasis Nilai Islam

1.1 Prinsip Tauhid (Ketuhanan)

Konsep tauhid menegaskan bahwa setiap aktivitas dalam pengelolaan keuangan, termasuk proses penganggaran, diperuntukkan sebagai salah satu bentuk ibadah dan ketaatan terhadap Allah SWT. Dengan memahami prinsip ini, anggaran tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, melainkan juga sebagai amanah yang perlu dilaksanakan dengan kesadaran moral dan spiritual. Pelaksanaan anggaran seharusnya mencerminkan komitmen dan rasa tanggung jawab kepada Sang Pencipta, sehingga seluruh keputusan serta tindakan dalam pengelolaan dana harus berlandaskan pada norma dan aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini menuntut adanya transparansi, kedisiplinan, serta akuntabilitas yang tinggi agar penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip syariah dapat dihindari.

1.2 Prinsip Keadilan (Equilibrium/Keseimbangan)

Prinsip keadilan mengharuskan pelaksanaan anggaran dengan mempertimbangkan keseimbangan serta distribusi sumber daya yang merata. Dalam perspektif Islam, keadilan berfungsi sebagai dasar sosial yang mencegah munculnya ketidakadilan dan penindasan. Alokasi anggaran perlu dilakukan secara setara untuk memenuhi kebutuhan semua segmen masyarakat, khususnya bagi kelompok yang kurang beruntung dan rentan. Aspek ini juga mencakup penggunaan dana yang efisien untuk menghindari pemborosan, serta memastikan bahwa manfaat dari anggaran dapat dinikmati oleh semua. Dengan demikian, proses penganggaran berkontribusi pada terbentuknya tatanan sosial yang harmonis dan berkelanjutan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an (QS. Al An'am: 152, QS. Al-Maidah: 8).

1.3 Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Mendorong Kebaikan dan Mencegah Kemungkaran)

Prinsip ini menjadikan anggaran sebagai alat untuk membimbing perilaku serta aktivitas sejalan dengan ajaran Islam. Anggaran seharusnya berfungsi sebagai panduan yang mendorong pelaksanaan program-program yang bermanfaat (amar ma'ruf) dan menghindarkan praktik-praktik yang merugikan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (nahi munkar). Dalam praktiknya, prinsip ini memerlukan adanya sistem pengawasan yang ketat, penjatuhan sanksi bagi yang melanggar, serta penghargaan untuk mereka yang taat dan berprestasi. Oleh karena itu, anggaran tidak hanya berperan sebagai instrumen pengelolaan keuangan, tetapi

juga sebagai alat moral dan sosial untuk memelihara integritas dan keberkahan dalam penggunaan dana publik.

1.4 Prinsip tanggung Jawab dan Keterbukaan

Tanggung jawab dan keterbukaan adalah dua prinsip kunci dalam penganggaran yang sesuai dengan syariat Islam. Prinsip ini memastikan bahwa semua langkah dalam pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dari segi moral, sosial, dan hukum. Keterbukaan artinya memberikan informasi yang jelas tentang perencanaan, pelaksanaan, dan laporan anggaran kepada publik, sehingga bisa memudahkan pengawasan dan mencegah adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tanggung jawab mengharuskan pengelola anggaran untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang mereka lakukan, serta menjamin bahwa dana digunakan untuk tujuan yang tepat dan sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip ini menekankan pentingnya kejujuran sebagai tanggung jawab utama dalam pengelolaan keuangan publik.

2. Peran Penganggaran Syariah dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Global

2.1 Meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan

Kapasitas penganggaran Islam untuk mempertahankan stabilitas sistem keuangan adalah salah satu manfaat utamanya. Mekanisme ini dapat mengurangi risiko sistemik, yang sering menyebabkan krisis internasional, dengan menghindari spekulasi dan memastikan bahwa semua pendanaan terikat pada aset nyata. Perusahaan keuangan Islam telah menunjukkan ketahanan yang lebih besar selama krisis keuangan global. Karena mereka tidak terpapar produk derivatif berisiko tinggi, organisasi keuangan Islam seringkali lebih tahan, seperti yang ditunjukkan oleh krisis keuangan 2008. Sukuk (obligasi Islam) adalah contoh instrumen yang mengaitkan nilainya dengan aset fisik, sehingga mengurangi volatilitas di pasar global.

2.2 Mendukung UMKM dan Inklusi Keuangan

Selain mendorong pengembangan UMKM dan meningkatkan inklusi keuangan, penganggaran Islam juga penting. UMKM dapat mengakses pendanaan yang adil dan sesuai syariah melalui perjanjian seperti mudarabah dan musyarakah. Cakupan layanan keuangan semakin meluas ke daerah terpencil berkat kemajuan teknologi digital dalam keuangan Islam, yang meningkatkan ketahanan ekonomi di tingkat akar rumput.

2.3 Instrumen Sosial Sebagai Jaring Pengaman Ekonomi

Alat keuangan dalam anggaran syariah, seperti zakat dan wakaf, menawarkan jaring pengaman ekonomi bagi kelompok yang berisiko. Uang yang dikumpulkan melalui perangkat ini dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan, mempertahankan daya beli pada saat darurat, dan memenuhi kebutuhan dasar populasi. Oleh karena itu, anggaran syariah menekankan keadilan dan keselamatan sosial serta pengembangan ekonomi.

2.4 Mendorong Ekonomi Berkelanjutan

Melalui pendanaan di industri ramah lingkungan, anggaran Syariah juga mendorong pembentukan ekonomi yang berkelanjutan. Agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat global telah didukung oleh penggunaan instrumen keuangan seperti green sukuk untuk membiayai energi terbarukan dan inisiatif infrastruktur hijau.

3. Implementasi dan Tantangan Penganggaran Berbasis Nilai Islam di Berbagai Negara

Penganggaran berlandaskan nilai-nilai Islam mulai diterapkan oleh sejumlah negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, seperti Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi, dengan aktentuasi pada asas keadilan, keterbukaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, prinsip-prinsip Islam mulai diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran melalui pendekatan *value-based budgeting* yang berlandaskan maqashid al-shariah (tujuan-tujuan syariah), yang menempatkan nilai kemanusiaan di atas kepentingan lainnya (Ahmad, 2019). Hal ini tercermin melalui optimalisasi pendapatan dari zakat, infaq, dan sadaqah sebagai sumber pendapatan daerah, serta penerapan prinsip tauhid dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran (Yusup, 2019). Di Malaysia, bentuk penerapan dilakukan melalui *Islamic Public Finance Management (IPFM)*, yang menggabungkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dengan nilai-nilai etika Islam. Sementara itu, Arab Saudi mengadopsi prinsip-prinsip Islam dalam pengeluaran publik dengan menekankan transparansi, efisiensi, dan distribusi keadilan melalui program *Vision 2030* yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam reformasi ekonominya.

Meskipun telah mengalami perkembangan, implementasi sistem penganggaran berbasis nilai Islam masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan signifikan. Tantangan utama terletak pada kurangnya pemahaman yang mendalam dari para pembuat kebijakan terhadap prinsip maqashid al-shariah dan keterbatasan dalam mentransformasikan prinsip-prinsip tersebut secara praktis ke dalam sistem penganggaran modern (Safrudin, 2024). Selain itu, belum adanya regulasi baku yang dapat dijadikan acuan lintas negara membuat pendekatan ini bersifat fragmentaris dan kontekstual dan menyebabkan terjadinya perbedaan interpretasi prinsip syariah antarnegara. Tantangan lainnya adalah resistensi institusional dalam birokrasi konvensional yang belum sepenuhnya adaptif terhadap integrasi nilai-nilai etika Islam, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi syariah dan tata kelola anggaran negara.

Sebagai solusi, diperlukan harmonisasi dan upaya standarisasi regulasi lintas negara melalui kolaborasi lembaga mengenai kerangka kerja penganggaran berbasis nilai Islam yang dapat diterapkan secara fleksibel di berbagai negara. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan khusus ekonomi syariah dan

pelatihan teknis penganggaran berbasis nilai Islam menjadi hal krusial untuk memperkuat pemahaman dan komitmen terhadap nilai-nilai syariah. Pemerintah diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan dan lembaga otoritas syariah guna menyusun kebijakan fiskal yang mencerminkan prinsip maqashid al-shariah. Selain itu, riset-riset lintas negara perlu dikembangkan dan ditingkatkan guna memperkaya dan menjadikan model penganggaran berbasis nilai Islam menjadi model yang komprehensif sehingga bersifat aplikatif dan berkontributif terhadap ketahanan ekonomi global. Hal ini sejalan dengan fungsi anggaran sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan, stabilitas ekonomi, dan pemerataan pendapatan dalam mencapai tujuan bernegara (Jaelani, 2018).

KESIMPULAN

Penganggaran yang mengacu pada nilai-nilai Islam menjadi pilihan strategis untuk memperkuat daya tahan ekonomi dunia. Pendekatan ini menitikberatkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial. Tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap syariah, sistem ini juga memaksimalkan peran instrumen sosial seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Pengelolaan anggaran berbasis syariah terbukti mampu menjaga stabilitas keuangan, mendukung pertumbuhan UMKM, memperluas akses keuangan, serta menyediakan perlindungan sosial melalui instrumen keuangan Islam. Selain itu, sistem ini juga mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan mendukung program-program ramah lingkungan.

Meski demikian, penerapan penganggaran berbasis nilai Islam masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman terhadap prinsip maqashid al-shariah, belum serasinya regulasi antarnegara, dan keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang ekonomi syariah. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kualitas SDM, serta sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan otoritas syariah. Dengan langkah-langkah tersebut, penganggaran berbasis nilai Islam berpotensi menjadi model yang adil, transparan, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin rumit.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. (2019). Fiqh of budgeting: study of Management of the State Budget for People's welfare in the perspective of Maqâshid al-Shari'ah. *Al-Adalah*, 16(1), 177-206.
- Al-Qahtani, S., & Darussalam, A. Z. (2025). Sustainability of the Syari'ah Economic

System in Overcoming the Global Financial Crisis. *Journal of Multidisciplinary Sustainability Asean*, 2(1), 35-45.

Arno, A. K., (2019). Penyusunan Anggaran Perspektif Fiqhi Anggaran Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law*, (1), 30-40.

Bakhroni, M, A., Muchlis, M, M., 2025, Dampak Kebijakan Ekonomi Syariah terhadap Stabilitas Makroekonomi di Indonesia, *Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak*, Vol. 2 No. 1 hlm. 193-201

Fitriani, A. (2024). The Role of Islamic Economics in the Global Economy. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 2(1), 22-29.

Jaelani, A. (2018). A performance-based budget system in Indonesia“ s state budget in Islamic economic perspective. *MPRA Paper*, 87984.

Judijanto, L., & Rizani, A. (2024). Dampak Kebijakan Keuangan Islam terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Global. *Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science*, 3(4), 437-449.

Mutiari, S, P., Kamilah, K., 2025, DAMPAK KEUANGAN SYARIAH PADA KETAHANAN EKONOMI DI MASA PANDEMI, *Jurnal Sains Riset (JSR)*, Vol. 15 No. 1 hlm. 49-55

Nazori., Rafidah., Mubyarto, N., Mutia, A., Rosmanidar, E., 2024, Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendorong Stabilitas Ekonomi: Wawasan dari Kontribusi Ilmiah Terbaru, *Jurnal EMT KITA*, Vol. 8 No. 4

Rahman, A. (2016). Sekularisme Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Partisipatif Dalam Perspektif Islam. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 4(1), 92-103.

Safrudin, A. (2024). Tantangan Dan Peluang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia Di Lembaga Pendidikan Islam: Perspektif Kesejahteraan Dan Produktivitas Kerja. *Journal of Mandalika Literature*, 5(4), 908-917.